Eddy R. Rasyid, Suhairi, Husna Roza

Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

Evaluasi Sistem Value For Money Dan Analisis Kinerja: Kasus Dinas Kebersihan Kota Padang (Cost-Benefit Evaluation and Performance Analysis: The Sanitation Service of the City of Padang)

Workshop on Strengthening Regional University Capacity for Decentralization

Project 497-0357 / 204-000
Strategic Objective 1
ECG, USAID/Indonesia
Contract No. 497-C-00-98-00045-00

Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS)
University of Maryland at College Park

March 2000

LAPORAN PENELITIAN

EVALUASI SISTEM VALUE FOR MONEY DAN ANALISIS KINERJA : KASUS DINAS KEBERSIHAN KOTA PADANG

Oleh :

Eddy R. Rasyid

Suhairi

Husna Roza

PUSAT STUDI KEUANGAN DAERAH

(Centre for Regional Finance Studies)

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2000

Evaluasi Sistem Value For Money dan Analisis Kinerja: Kasus Dinas Kebersihan Kota Padang

Oleh: -Eddy R Rasyid

-Suhairi

-Husna Roza

I. Pendahuluan

Kota Padang merupakan ibukota Propinsi Sumatera Barat terletak pada 0 58' 4'' Lintang Selatan dan 100 21' 11'' Bujur Timur dengan luas daerah 694,96 kilometer persegi. Karena sebagian besar wilayahnya merupakan daerah perbukitan, hanya seluas 180 km^2 yang efektif untuk dibangun. Dengan 11 kecamatan dan 193 kelurahannya, Kota Padang berbatas dengan : Kabupaten Padang Pariaman di Sebelah Utara, Kabupaten Pesisir Selatan di Sebelah Selatan, Kabupaten Solok di Sebelah Timur, dan Samudera Indonesia di Sebelah Barat.

Lebih dari 18% daerah Kota merupakan daerah bergelombang dengan kemiringan antara 15^o - 40^o. Sementara itu, Kota Padang dialiri sungai-sungai mengalir dari timur dan bermuara ke Samudera Indonesia seperti Sungai Batang Air Dingin, Batang Kuranji, Batang Arau, Banjir Kanal, Batang Muara, Batang Belimbing, Batang Kandis, Batang Buo, Sungai Kayu Aro, Sungai Timbalun, Sungai Koto, dan Sungai Pisang. Mungkin karena ini sebagian Kota Padang termasuk daerah rawan banjir dan erosi. Tetapi setelah berfungsinya Banjir Kanal, bahaya banjir tersebut dapat dikendalikan.

Pada tahun 1998 penduduk Kota Padang berjumlah 783.888 jiwa, yang terdiri dari 387.757 jiwa laki-laki dan 396.131 jiwa perempuan dengan tingkat pertumbuhan penduduk 2,67 %. Tentu saja pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini, harus diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat baik pemukiman, pendidikan, kesehatan, maupun sarana sosial lainnya. Kepadatan penduduk meningkat menjadi 1.128 orang per km^2 pada tahun 1996 dari hanya 908 orang per km^2 pada tahun 1990. Sebagaimana daerah perkotaan umumnya, penyebaran penduduk terpusat di pusat kota. Tabel 1 menampilkan angka penyebaran penduduk untuk setiap kecamatan.

Sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat, Kota Padang telah berkembang menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat industri, dan pusat pendidikan serta menjadi pintu gerbang pariwisata Sumatera Barat. Sebagai pusat pertumbuhan wilayah, pembangunan daerah tidak saja berpengaruh pada pertumbuhan Kota Padang tapi juga daerah lainnya di Propinsi Sumatera Barat.

Semenjak pembangunan dalam Pelita VI, Kota Padang telah mengimplementasikan strategi perencanaan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan sebagai usaha untuk mengantisipasi pertumbuhan sub-pusat pengembangan baru. Strategi inilah yang menjadi salah satu landasan kerja bagi Dinas Kebersihan Kota.

Strategi perencanaan dan pengelolaan tata ruang kota seperti disebut diatas sebenarnya dituntun oleh Undang-Undang No. 4 tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disamping mengacu pada strategi itu, Dinas Kebersihan tentu harus mempertimbangkan pula karakteristik khusus Kota Padang. Untuk itu pengelolaan kebersihan kota diintegrasikan kedalam program Kota Padang yang dikenal dengan Program K-3: Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, yang dicanangkan sejak tahun 1973. Penggabungan ke tiga hal ini ke dalam satu paket program didasarkan pandangan bahwa ketiga hal tersebut memang seharusnya merupakan suatu rangkaian kegiatan terpadu. Keindahan akan tercipta apabila kebersihan telah diwujudkan, dan kebersihan hanya akan dicapai apabila masyarakat hidup secara tertib.

Program K-3 merupakan suatu gerakan yang melibatkan semua potensi, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat semua lapisan. Tujuan program ini adalah untuk menciptakan suatu lingkungan kehidupan kota yang tertib, aman, lancar, sehat, dan bersih serta indah dengan memperhatikan potensi dan aspirasi warga kota. Sasaran program K-3 meliputi semua aspek lingkungan perkotaan, yaitu pengelolaan sampah, penataan dan pengawasan bangunan, penataan dan pengawasan jalur hijau dan taman-taman, menjaga dan mengawasi pelestarian hutan, serta melaksanakan tindakan hukum terhadap para pelanggaran semua ketentuan di atas.

Berikut adalah evaluasi sistem value for money dan analisis kinerja dari Dinas Kebersihan untuk tahun 1998/99. Periode ini dipilih karena data yang tersedia lengkap dan yang paling terbaru.

II. Manajemen Kebersihan

Manajemen Dinas kebersihan Kota Padang meliputi tugas pokok dan fungsi , sumber daya yang dimiliki, perumusan sasaran dan program kerja Dinas Kebersihan Kota Padang.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan. Tugas pokok Dinas Kebersihan tertuang dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 1984, yaitu "membantu Walikotamadya dalam penyelenggaraan otonomi daerah di bidang kebersihan". Dengan demikian, pelasaksanaan tugas pokok tersebut harus dipertanggungjawabkan Kepala Dinas Kebersihan Kota kepada Walikota Padang.

Fungsi Dinas Kebersihan adalah :

a. Menyusun program kerja di bidang kebersihan
b. Menyelenggarakan sistem penanggulangan sampah dan air kotor yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan serta pengolahan dan pemanfaatannya.
c. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan.

d. Mengawasi perencanaan dan pelaksanaan sistem pembuangan sampah dan air kotor dari bangunan umum dan tempat usaha yang menimbulkan pengotoran lingkungan
e. Melakukan pengamatan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah dan air kotor.
f. Memberikan pelayanan kebersihan kota kepada masyarakat, instansi pemerintah dan swasta.
g. Mengawasi dan memberikan perizinan terhadap sitiap bentuk usaha yang bergerak di bidang kebersihan.
h. Menyelenggarakan pungutan retribusi kebersihan kota terhadap warga atas jasa penyelenggaraan kebersihan.
i. Mengawasi kepatuhan masyarakat terhadap Perda mengenai K-3
j. Bekerjasama dengan instansi lain dalam menanggulangi pencemaran akibat sampah, air kotor dan gas atau asap.

Organisasi. Uraian tugas masing-masing pejabat dilingkungan Dinas Kebersihan dijelaskan berikut ini.

Kepala Dinas Kebersihan

Kepala dinas kebersihan kota yang merupakan pimpinan tertinggi dalam organisasi memiliki tugas sebagai berikut:

- Membantu walikota dibidang kebersihan, memimpin, mengkoordinasikan serta mengawasi kegiatan kebersihan.
- Memberikan informasi dan pertimbangan kepada walikota dibidang kebersihan.
- Mempertanggungjawabkan tugas-tugas kepada walikotamadya.
- Menempatkan pegawai-pegawai DPK dalam jabatan tertentu
- Memelihara dan meningkatkan kemampuan kerja
- Mengadakan kerjasama dalam mengelola kebersihan dengan instansi terkait dan pihak swasta

Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha oleh kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan tugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dinas kebersihan kota. Dalam pelaksanaan tugasnya ini, sub bagian tata usaha dibantu oleh (b.1) Urusan Umum, (b.2) Urusan Keuangan, (b.3) Urusan Kepegawaian, dan (b.4) Urusan Perlengkapan. Uraian tugas yang menjadi tanggungjawab bagian ini adalah:

- Menyelenggarakan kegitan tata persuratan bidang ADM & Umum
- Menyelenggarakan pengelolaan ADM kepegawaian dan pembinaan karir pegawai
- Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dinas
- Menyelenggarakan ADM perbekalan serta urusan rumah tangga dinas
- Menyelenggarakan pembinaan organisasi
- Menyelenggarakan dokumentasi & publikasi dinas
- Memberikan saran & pertimbangan kepada kepala dinas sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok.

Seksi Penanggulangan Sampah (Sie. PS)

Seksi penanggulangan sampah dipimpin oleh seorang kapala seksi, dan memiliki tugas pengumpulan, pengangkatan, pembuangan dan pemusnahan sampah. Dalam pelaksanaan

tugasnya, seksi ini dibantu oleh (c.1) Kasubsi Pengangkatan Sampah, (c.2) Kasubsi Pemusnahan Sampah, dan (c.3) Kasubsi Sarana Penanggulangan Sampah. Secara lebih rinci seksi ini berfungsi :

- Menyelenggarakan sistem penanggulangan sampah
- Mengarahkan & membimbing usaha penanggulangan sampah
- Melaksanakan sarana pengelolaan sampah
- Mengusahakan agar sampah dapat diolah untuk keperluan lain.

Seksi Penanggulangan Air Kotor (Sie PAK)

Seksi ini dipimpin oleh Kepala Seksi dengan tugas utama adalah melaksanakan pengambilan, pengangkatan dan pemusnahan air kotor serta mengelola sarana tempat pembuangannya. Dalam pelaksanaan tugasnya, seksi ini dibantu oleh (d.1) Kasubsi Pengangkatan Air Kotor, (d.2) Kasubsi Pemusnahan Air Kotor, dan (d.3) Kasubsi Sarana Penanggulangan Air Kotor. Secara lebih rinci tugas seksi ini adalah:

- Menyelenggaran pengangkatan dan penanggulangan air kotor.
- Mengawwasi pelaksanaan pengangkatan dan pemusnahan air kotor.
- Meneliti sarana penampungan air kotor
- Mengusahakan agar sarana air kotor dapat dipergunakan untuk keperluan lainnya.

Seksi Kebersihan Taman Pemakaman Umum (Sie. TPU)

Seksi taman pemakamam umum mempunyai tugas melayani permintaan warga akan pelayanan pemakaman serta merawat dan membersihkan areal makam. Seksi ini dikepala seorang Kepala Seksi, dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu (e.1) Kasubsi Pelayanan Jenazah, (e.2) Kasubsi Perawatan Kebersihan TPU. Secara lebih rinci tugas seksi ini adalah :

- Meneyelenggarakan pelayanan sarana angkutan jenazah
- Mengatur penempatan jenazah serta merawat areal makam

Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat (Sie. PPM)

Seksi ini mempunyai tugas membimbing, melaksanakan penyuluhan dan meningkatkan peran serta masyarakat dibidang kebersihan dan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Dalam pelaksanaan tugasnya seksi ini dibantu (f.1) Kasubsi penyuluhan, dan (f.2) Kasubsi Peran Serta Masyarakat. Tugas rinci dari seksi ini adalah:

- Mengarahkan dan membimbing masyarakat dibidang kebersihan
- Menyusun materi dan metoda penyuluhan
- Membina dan meningkatkan peran serta masyarakat
- Menghimpun dan menyusun serta menyajikan laporan tentang kebersihan.

Seksi Angkutan dan Peralatan (Sie. AP)

Seksi ini dipimpin oleh seorang kepala Seksi dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh (g.1) Kasubsi Angkutan, dan (g.2) Kasubsi Peralatan. Tugas seksi ini adalah:

- Menyelenggaran ADM sarana angkutan dan peralatan
- Melakukan perawatan atas sarana angkutan dan peralatan
- Melakukan inventarisasi dan perencanaan peralatan.

Sumber Daya. Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dijelaskan di atas membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar, terutama untuk tenaga kerja lapangan. Karyawan Dinas Kebersihan Kota Padang berjumlah 364 orang yang terdiri dari 84 orang PNS dan 280 orang berstatus honorer yang umumnya adalah petugas lapangan dan berpendidikan SD atau SLTP. Tenaga kerja berpendidikan SLTP atau lebih rendah berjumlah 237 orang, yang terutama ditempatkan pada Seksi Angkutan & Peralatan (AP) dan Seksi Penanggulangan Sampah (PS). Sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan Diploma dan Strata 1 berjumlah 18 orang yang bekerja pada Seksi Tata Usaha (TU) ataupun Seksi-Seksi lainnya. tetapi sebagai Kapala Bagian Seksinya. Tabel 2 menjelaskan beberapa karakteristik sumberdaya manusia pada Dinas Kebersihan Kota Padang.

Peralatan merupakan sumberdaya penting bagi Dinas Kebersihan terutama untuk mengangkut sampah rumah tangga ke Lokasi Pengumpulan Sementara (LPS), dan dari LPS ke Lokasi Pengumpulan Akhir (LPA). Tabel 3 menggambarkan peralatan yang dimiliki.

Pelaksanaan K-3 dilakukan secara terpadu dengan melibatkan semua potensi dan terkoordinir dalam lintas sektoral dengan prinsip bahwa itu semua merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Ada empat aspek pokok yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan K-3, yaitu (1) aspek legalitas, dimana pelaksanaan K-3 didasarkan pada Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Walikota, (2) Aspek Pendidikan dan Penyuluhan, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan, direncanakan dan dilaksanakan penyuluhan-penyuluhan kepada segenap warga Kota yang melibatakan tokoh-tokoh masyarakat baik Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Ketua RT/RW, Tokoh Wanita, dan Toko Pemuda serta Organisasi lainnya, (3) Aspek Pelaksanaan, dengan membentuk tim K-3 yang merupakan team koordinasi yang membantu pemeritah kota, melaksanakan reorganisasi RT dan RW dengan menetapkan tugas pembinaan ketertiban dan ketentraman sebagai bagian tugas RT dan RW, dan dengan mengeluarkan kebijaksanaan organisasi yang diimbangi dengan penambahan peralatan dan sarana, dan (4) aspek penegakan hukum melalui menumbuhkan kapastian dan ketegasan hukum secara merata keseluruh masyarakat.

Dengan memperhatikan aspek-aspek pokok pengelolaan kebersihan tersebut, Dinas Kebersihan Kota merancang sistem pemusnahan sampah. Sebelum tahun 1981 proses pemusnahan sampah di Kotamadya Padang dilaksanakan dengan sistem tidak langsung, maksudnya menggunakan bak-bak sampah sebagai pembuangan sementara. Namun berdasarkan pengalaman, penggunaan bak-bak sampah ini mempunyai banyak kelemahan dan menimbulkan masalah yang sangat menghambat dalam pelaksanaan pemusnahan sampah.

Karena kelemahan sistem tidak langsung tersebut maka pemerintah Kotamadya Padang mengusahakan sistem lain yang diperkirakan lebih efektif. Sistem tersebut kemudian disebut sebagai sistem langsung, dimana pemusnahan sampah dilakukan secara langsung dari sumber sampah ke LPA tanpa menggunakan bak sampah.

Masyarakat diminta untuk memasukkan sampah kekantong/karung sampah dan kemudian ditempatkan di lokasi-lokasi LPS tertentu yang mudah dijangkau oleh truk angkut sampah. Penumpukan sampah pada lokasi LPS ini dilakukan pada sore-sore hari dan akan segera diangkut oleh truk sampah pada pagi harinya. Sistem Pengelolaan sampah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Sampah ditumpuk oleh warga di halaman rumah/bangunan dan diangkat pada jam ditentukan

Sampah dimasukkan dalam kantong

Sampah diambil oleh petugas kebersihan kelurahan/LKMD dan ditumpuk di TPS dengan rapi

Sampah di TPS diangkut oleh petugas DPK/LKMD

Sanitary Landfill

Incenerator

Komposting

Kegiatan pengumpulan menjadi tangungjawab bersama pemerintah dan masyarakat. Pengumpulan sampah ini diatur sebagai berikut:

a. Sampah kering atau ringan yang bukan benda tajam dimasukkan ke dalam karung dan diikat dengan rapi.
b. Sampah keras seperti pecahan kaca, besi, kaleng dan benda tajam lainnya dimasukkan ke dalam keranjang yang cukup kuat untuk dapat diangkat dengan truk.
c. Sampah dalam bentuk penebangan pohon-pohon harus diikat dengan rapi.

Ketiga kegiatan di atas menjadi tanggungjawab masyarakat dan dilaksanakan oleh produsen sampah untuk kemudian diletakkan di halaman rumah, toko, kantor, pabrik yang dapat dijangkau kendaraan bermotor atau pada lokasi LPS yang terdekat.

Agar tidak mengganggu keindahan kota dan menimbulkan bau yang tidak enak, penumpukan sampah pada lokasi-lokasi tertentu atau pada LPS tertentu hanya boleh dilakukan pada sore atau malam hari. Lokasi Pembuangan Sementara di lingkungan kelurahan Kotamadya Padang berjumlah lebih dari 100 lokasi. Pada pagi harinya yaitu sekitar jam 7.00 wib, truk-truk sampah akan memungut dan membawa ke Lokasi Pembuangan Akhir (LPA).

Keuntungan pengumpulan sampah dengan mamakai kantong ini adalah:

a. Aroma dan fisik sampah yang mengganggu tidak menyebar.
b. Memudahkan petugas dalam mengangkat dan mengangkut sampah.
c. Waktu yang dibutuhkan dalam pembuangan relatif singkat.
d. Melindungi sampah dari kemungkinan berserakan kembali.
e. Petugas terhindar dari kotoran.

Kegiatan pengangkutan merupakan pengangkutan sampah dari LPS atau dari tempat-tempat lainnya, misalnya sampah hasil gotong royong masyarakat, ke LPA dengan mengunakan truk-truk sampah ataupun kendaraan lainnya.

Pemusnahan sampah dilaksanakan di LPA dengan menggunakan sistem Sanitary Landiff. LPA sejak tahun 1989 telah dipindahkan dari Lubuk Buaya, ke Air Dingin Kecamatan Koto Tangah yang berjarak 17 Km dari pusat Kota. Lokasi LPA di Air Dingin ini sangat tepat sekali karena jauh dari pemukiman serta diapit oleh 2 bukit yang tidak mempunyai aliran air. Untuk lebih mendukung dan menjaga lingkungan setiap hari dilakukan penyemprotan lalat dengan menggunakan obat merk Tiodan.

Hampir di seluruh wilayah pusat kota khususnya daerah-daerah yang dilalui jalan utama, program kebersihan kota telah terlaksana dengan baik. Masyarakat secara teratur memasukkan sampahnya ke dalam kantong-kantong sampah dan pada jam yang telah ditentukan meletakkannya di tempat penumpukan sementara. Secara teratur sampah pada lokasi LPS akan diangkut dengan truk dari Dinas Kebersihan Kota untuk selanjutnya dibawa ke lokasi pembuangan akhir untuk dimusnahkan.

Mekanisme pengumpulan sampah melalui organisasi RT, RW, dan LKMD juga telah berjalan secara baik, khususnya untuk daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau oleh Truk dari Dinas Kebersihan Kota. Ini dapat mengurangi dibuangnya sampah di sembarangan tempat seperti di riol.

Pada wilayah pinggiran kota, pengelolaan sampah belum sepenuhnya dapat ditangani secara baik. Sebagian besar pada daerah pinggiran ini, masyarakat memusnahkan sampah secara swadaya melalui pembuatan lobang, membakar, dan menutup dengan tanah.

Perumusan Sasaran. Sasaran mengambarkan tentang apa yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 tahun akan datang. Rumusan sasaran sangat penting untuk memberikan arah dan tuntunan (pedoman) dalam penyusunan program kerja. Perumusan sasaran pada Dinas Kebersihan Kota Padang diawali dengan usulan Kepala Dinas Kebersihan untuk kemudian mendapatkan persetujuan Walikota Padang. Sasaran selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi Kotamadya Padang. Misalnya, pada tahun 1997/98 sasaran yang ingin dicapai adalah "Mempertahankan Piala Adipura", karena pada tahun sebelumnya Kota Padang berhasil mempertahankan Lambang Kebersihan Nasional yaitu Piala Adipura Kencana. Sedangkan pada tahun 1999/2000

adalah "Meningkatkan Fungsi Utama Kota Padang sebagai kota Perdagangan, Industri, dan Pariwisata melalui peningkatan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan".

Program Kerja

Program kerja dan prioritas dibidang K-3 yang telah disusun oleh Dinas Kebersihan Kotamadya Padang untuk tahun 1999/2000 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sistem yang Ada

■ *Penyapuan jalan-jalan utama*

Peningkatan sistem penyapuan jalan ini dilakukan dengan meningkatkan jumlah petugas kebersihan jalan. Peningkatan jumlah petugas ini diperlukan karena diperlukan shif kerja sore, khususnya pada jalan-jalan utama. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan dan mempertahankan kebersihan jalan sepanjang hari. Petugas kebersihan ini digaji secara harian dan untuk meningkatkan motivasi kerjanya akan diadakan penyesuaian upah dengan standar UMR serta fasilitas lainnya.

■ *Pengangkatan sampah rumah tangga ke LPS*

Peningkatan sistem pengangkatan sampah rumah tangga ke LPS dilakukan antara lain dengan menambah jumlah petugas kebersihan kecamatan dari 215 menjadi 420 orang. Penambahan akan dilakukan untuk kecamatan-kecamatan yang selama ini belum mampu mengatasi tumpukan sampah di lingkungannya.

■ *Pengangkatan sampah dari LPS ke LPA*

Peningkatan sistem pengangkatan sampah dari LPS ke LPA dilakukan melalui peningkatan frekuensi pengangkutan sampah terutama pada hari-hari tertentu dimana produksi sampah Kotamadya Padang jauh lebih banyak. Karena fasilitas kendaraan yang dimiliki masih terbatas maka untuk mensukseskan program ini, dibutuhkan peningkatan jumlah kendaraan (Truk Sampah) dan perawatan yang lebih insentif terhadap kendaraan yang dimiliki sehingga dapat dioperasikan pada saat dibutuhkan.

■*Pengolahan dan pemusnahan sampah*

Untuk pemusnahan sampah di TPA akan dilakukan beberapa terobosan baru sehingga proses pemusnahan tersebut lebih efektif dan lebih efisien. Salah satu alternatif yang telah dipikirkan adalah dengan membuat TPA Model / Percontohan. Di samping itu diperlukan juga peningkatan program kesejahteraan petugas pengolahan dan pemusnahan sampah dengan mengadakan pengecekan kesehatan secara berkala.

■ *Penyuluhan K-3 Terpadu*

Peningkatan sistem penyuluhan dilakukan tidak hanya melalui pejabat tingkat Kotamadya, Kecamatan, Lurah, Petugas Kebersihan, tetapi juga melalui pemuka masyarakat dan mubalig. Di samping itu frekuensi penyuluhan juga perlu ditingkatkan sehingga budaya bersih dan budaya malu untuk menjaga kebersihan dapat ditingkatkan.

2. Melengkapi Sarana dan Prasarana K-3

■ *Pembuatan tempat-tempat sampah kecil*

Pembuatan tempat-tempat sampah kecil sangat membantu sekali dalam menanggulangi sampah, terutama pada tempat-tempat umum seperti lokasi taman, terminal, pelabuhan udara dan laut, loket pembayaran listrik, air, dan lain-lainnya. Para pedagang, diwajibkan untuk menyediakan tempat-tempat sampah kecil sehingga kebersihan dilingkungan mereka berjualan tetap terjaga.

■ *Pengadaan Becak dan Mobil Sampah*

Pengadaaan becak dan kendaraan (truk) sampah sangat dibutuhkan sekali untuk meningkatkan kemampuan pengangkutan sampah baik ke lokasi LPS maupun LPA. Dengan demikian, pelayanan pengakutan sampah rumah tangga akan lebih dapat ditingkatkan sehingga waktu penumpukkan sampah di lokasi LPS dapat diminimumkan.

■ *Pengecatan Castin dengan hitam-putih*

Untuk meningkatkan keindahan Kota, pengecatan canstin dengan hitam putih akan diprioritaskan, karena hal ini akan memberikan kesan tersendiri keindahan kota Padang.

3. Pembuatan Terobosan/Inovasi Baru dibidang Kebersihan

■ *Pembuatan jembatan timbang*

Pembuatan jembatan timbang diperlukan untuk mengukur volume pengangkutan sampah sehingga evaluasi prestasi dapat dilakukan dengan data yang lebih akurat. Di samping itu, penimbangan ini juga dapat digunakan untuk mengambilan keputusan misalnya tentang jadwal penimbunan yang diperlukan dan sebagainya.

■ *Pembuatan tempat cucian kendaraan dan Pembuatan Pool kendaraan*

Pembuatan pool dan tempat pencucian sangat dibutuhkan untuk perawatan kendaran yang lebih intensif. Oleh sebab itu, sarana pencucian kendaraan ini sangat dibutuhkan sekali.

Program kerja dan prioritas Dinas Kebersihan Kota Padang ini selanjutnya dibawa pada rapat kerja terpadu yang melibatkan dinas/instansi terkait dalam pengelolaan K-3. Rapat kerja menghasilkan dokumen yang disebut dengan Program Kerja Terpadu Pembenahan K-3. Tabel 6 adalah bagian program kerja tersebut yang menjadi tanggungjawab Dinas Kebersihan.

III. Sistem Value For Money dan Analisis Kinerja

Bagian berikut merupakan penguraian tentang aspek-aspek yang membangun sistem value for money dan analisis kinerja pada Dinas Kebersihan Kota Padang. Aspek-aspek tersebut meliputi sistem perencanaan dan pengendalian manajemen Dinas Kebersihan Kota Padang.

Penyusunan Anggaran. Penyusunan anggaran merupakan bagian integral dari suatu proses perencanaan. Program kerja yang disusun harus diikuti dengan penyusunan anggaran biaya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang telah ditetapkan dalam program kerja. Idealnya dalam penyusunan anggaran tersebut harus dibedakan antara biaya yang bersifat enjinir dan diskret. Biaya enjinir adalah biaya yang hubungan antara input dengan outputnya dapat ditentukan secara pasti sehingga bersifat variabel yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan biaya standar. Dari biaya enjinir akan dapat disusun anggaran fleksibel. Sedangkan biaya diskret adalah biaya yang hubungan antara input dan outputnya tidak dapat ditentukan secara pasti, dan besar kecilnya ditentukan oleh manajemen. Pengendalian biaya diskret dilakukan melalui penentuan kegiatan dan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dengan demikian, dari biaya diskret ini hanya akan dapat disusun anggaran appropriasi yaitu anggaran yang menunjukkan pengeluaran maksimum yang diizinkan.

Penyusunan anggaran pada Dinas Kebersihan Kota Padang telah berpedoman kepada program kerja yang telah ditetapkan. Program kerja yang telah ditetapkan akan dirumuskan dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata yang akan dilakukan serta biaya yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Hanya saja penyusunan anggaran tersebut belum mempertimbangkan klasifikasi biaya enjinir dan diskret. Sesuai dengan sifat Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran yang disusun lebih mengambarkan jumlah pengeluaran maksimum yang diizinkan.

Sumber-sumber pembiayaan Dinas Kebersihan Kotamadya Padang dapat dibagi 2 yaitu berasal dari Dana Rutin dan APBD. Dana Rutin digunakan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan rutin seperti gaji dan tunjangan petugas kebersihan serta biaya pemeliharaan. Sedangkan sumber dana APBD lebih banyak diarahkan untuk pembiayaan pengadaan sarana dan prasarana kebersihan tambahan yang dibutuhkan.

Dibandingkan dengan tahun 1998/1999, Anggaran Rutin tahun 1999/2000 mengalami peningkatan yang sangat berarti, yaitu dari Rp 1,9 Milyar menjadi Rp 3,2 Milyar. Hal ini sesuai dengan program kerja yang disusun, yaitu peningkatan jumlah petugas kebersihan sehingga meningkatkan belanja pegawai hampir 2 kali lipat, dan peningkatan biaya pemeliharaan terutama biaya pemeliharaan sanitasi. Untuk lebih lengkapnya, anggaran rutin Dinas Kebersihan Kotamadya Padang untuk tahun 1999/2000 dapat dilihat pada Tabel 7.

Penyusunan Informasi. Untuk pengendalian dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan diperlukan informasi, baik informasi keuangan maupun informasi non keuangan. Pada Dinas Kebersihan Kota Padang, informasi keuangan disiapkan oleh bagian keuangan. Sebagaimana pada umumnya di unit organisasi pemerintahan, administrasi keuangan (akuntansi) yang dilaksanakan berbasis pada anggaran. Akuntansi yang dilakukan adalah akuntansi atas realisasi anggaran. Dengan demikian, pada akhir periode akan dapat diketahui anggaran dan realisasi dari suatu pos pembiayaan.

Sementara itu, masing-masing seksi dalam organisasi Dinas Kebersihan juga melakukan pencatatan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan. Misalkan, dari petugas di LPA akan dapat diketahui volume sampah terangkut per hari melalui

penimbangan untuk setiap sampah yang diangkut truk sampah, pengolahan sampah, pembuatan kompos dan lain-lainnya. Akan tetapi, yang dilakukan itu terbatas hanya pada pencatatan. Tidak dilakukan penyusunan laporan regular seperti laporan mingguan atau bulanan. Laporan yang disusun hanyalah laporan tahunan sesuai dengan kebutuhan untuk pertanggungjawaban kepada Walikota. Penyusunan informasi yang seperti ini tentu berpengaruh pula kepada bagaimana pengendalian dilakukan oleh manajemen.

Pengendalian. Pengendalian (*control*) merupakan suatu proses untuk memastikan apakah aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan yang direncanakan dan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi, effisiensi dan effektifitas (E3). Proses pengendalian ini dilakukan oleh para pimpinan-pimpinan unit atau manajemen di Dinas Kebersihan yang pada akhirnya tentu ada dalam tanggungjawab Kepala Dinas. Berikut dipaparkan bagaimana pengendalian dilakukan oleh manajemen Dinas Kebersihan dimaksud.

Evaluasi Bulanan. Aktivitas harian dikendalikan oleh kepala-kepala unit melalui apa yang dikenal dengan *on the-spot control*. Masalah-masalah operasional terjadi, jika ada, langsung diatasi dilapangan. Hanya untuk masalah-masalah yang lintas-unit atau masalah khusus baru kemudian dilaporkan ke atasan yang kemudian dapat saja meneruskan ke Kepala Dinas. Laporan seketika ini disampaikan melalui alat komunikasi telpon atau radio.

Kepala Dinas baru terlibat dalam pengendalian bulanan yang dilakukan melalui 'rapat bulanan', setiap tanggal tujuh belas, diikuti oleh semua kepala-kepala unit dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas. Dalam rapat ini setiap kepala unit melaporkan pelaksanaan aktivitas di unit masing-masing di bulan tersebut. Perhatian difokuskan pada kendala yang dihadapi untuk dicarikan pemecahannya. Menariknya, laporan dimaksud adalah laporan lisan tanpa didukung oleh laporan tertulis berupa informasi kwantitatif tentang realisasi atau pelaksanaan suatu program atau aktivitas. Rapat ini kemudian diikuti dengan peninjauan lapangan oleh Kepala Dinas seminggu kemudian guna mendapatkan laporan langsung dari unit-unit pelaksana. Peninjauan ini ditujukan untuk mencek langsung pelaksanaan aktivitas dilapangan.

Argumentasi yang diberikan oleh Kepala Dinas tentang digunakannya informasi terukur untuk mengevaluasi kinerja unit-unit adalah kepraktisan. Maksudnya meminta unit-unit untuk menyiapkan laporan tertulis bulanan tentang kinerja membutuhkan waktu yang dapat menyebabkan rapat tidak dapat dilaksanakan secara regular.

Laporan Tahunan. Kalau sebelumnya dijelaskan tidak ada data statistik kinerja disiapkan untuk rapat evaluasi bulanan, Dinas Kebersihan Kotamadya Padang menerbitkan data tersebut setiap tahun. Data yang diterbitkan ini terutama berguna untuk penilaian yang dilakukan dalam rangka pemberian Piala Adipura dan sebagai

bahan penyusunan laporan bagi kantor Walikota. Tentu juga berguna sebagai data pendukung bagi penyusunan anggaran tahun akan datang.

Berikut ini adalah ilustrasi data tentang kinerja tahunan yang dapat dikumpulkan. Sebenarnya Tabel 8 bukanlah melaporkan secara khusus kinerja Dinas Kebersihan, tetapi ini melaporkan kinerja dari pelaksanaan program K3 untuk tahun 1997/1998. Ketika menyusun kasus ini, tidak diperoleh data/laporan yang lebih baru.

Tabel 9 melaporkan kinerja Dinas Kebersihan dalam hal pengumpulan sampah untuk tahun 1999.

Penilaian Kinerja (Performances). Manajemen Dinas Kebersihan Kota Padang tidak melakukan analisis atas kinerja baik kinerja keuangan maupun kinerja operasional. Laporan keuangan yang disediakan untuk setiap tahun memuat hanya realisasi anggaran untuk setiap mata anggaran. Data hasil atau capaian operasional dilaporkan seperti diilustrasikan pada bagian sebelumnya dalam kasus ini. Analisis kinerja yang dilakukan hanyalah penilaian oleh atasan kepada unit-unit organisasi dibawahnya, khususnya penilaian oleh Kepala Dinas, yang berdasarkan pada laporan disampaikan dalam rapat bulanan seperti dijelaskan sebelumnya.

IV. Identifikasi Permasalahan.

Berikut ini adalah beberapa pertanyaan bermanfaat yang dapat diajukan atas penjelasan sebelumnya. Namun pertanyaan tidak hanya meliputi "what" atau apa masalahnya, tapi juga "how" atau bagaimana masalah itu bisa timbul, "why" atau kenapa masalah itu bisa timbul, dan "what if" yaitu tentang bagaimana kalau seandainya yang terjadi "begini" bukannya "begitu." Pertanyaan *what if* ini dapat diarahkan untuk memberikan rekomendasi perbaikan.

Pertanyaan dimaksud adalah:

1. Apa kebaikan ataupun kekurangan sistem manajemen perencanaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Padang ?

2. Apakah sistem manajemen perencanaan dan pengendalian pada Dinas Kebersihan Kota Padang telah mengkomodasi konsep *value for money*?

3. Apakah dalam sistem dalam sistem manajemen tersebut telah terpadu *VFM review system*?

4. Dapatkah diidentifikasikan kinerja manajemen Dinas Kebersihan Kota Padang dalam hal *E3*?

V. Penutup

Pada Dinas Kebersihan Kota Padang memang belum nampak diterapkannya SistemValue for Money dan Analisis kinerja secara lengkap. Penerapan konsep ini memerlukan informasi mendetail tentang kegiatan setiap unit yang ada di Dinas Kebersihan beserta biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Informasi yang diperlukan tersebut haruslah secara tertulis. Adalah perlu waktu guna mewujudkan harapan tersebut diatas, agar Sistem Value for Money dan Analisis Kinerja dapat terwujud di Dinas Kebersihan Kota Padang

Tabel 1
Jumlah Kelurahan, Luas Daerah, dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas km^2	Jumlah Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk per km^2
Bungus Teluk Kabung	100,78	13	21.706	215,4
Lubuk Kilangan	85,99	7	39.911	464,1
Lubuk Begalung	30,91	21	96.186	3.111,8
Padang Selatan	10,03	24	63.627	6.343,7
Padang Timur	8,15	27	85.681	10.513,0
Padang Barat	7,00	30	72.539	10.362,7
Padang Utara	8,08	18	85.535	10.586,0
Naggalo	8,07	7	68.253	8.457,6
Kuranji	57,41	9	79.699	1.388,2
Pauh	146,29	13	42.860	293,0
Koto Tangah	232,25	24	127.891	550,7
Jumlah	694,96	193	783.888	1.128,0

Sumber: Padang dalam Angka, 1998

Tabel 2
Jumlah Karyawan Dinas Kebersihan Kota Menurut
Seksi, Pendidikan, dan Status Kepegawaian (orang)

Seksi	TU	PPM	PAK	TPU	AP	PS	Jumlah
PNS	26	9	5	6	17	21	84
SD	1	1	-	2	12	5	21
SLTP	-	-	-	-	1	3	4
SMU	21	5	3	4	2	13	48
D 3	-	2	1	-	-	-	3
S 1	4	1	1	-	2	-	8
HONORER	26	2	4	16	110	122	280
SD	1	1	-	2	81	91	176
SLTP	1	-	2	8	11	14	36
SMU	22	1	2	4	16	16	61
D 3	1	-	-	-	-	-	1
S 1	1	-	-	2	2	1	6
JUMLAH	52	11	9	22	127	143	364
SD	2	2	-	4	93	96	197
SLTP	1	-	2	8	12	17	40
SMU	43	6	5	8	18	29	109
D 3	1	2	1	-	-	-	4
S 1	5	1	1	2	4	1	14

Sumber: Diolah dari data di Sub-Bagian Tata Usaha Dinas Kebersihan Kota Padang

Tabel 3
Jumlah Peralatan yang Dimiliki Dinas Kebersihan Kota Menurut Jenisnya

Jenis Peralatan	Jumlah (unit)
Gerobak	993
Truk	58
TOS	238
Buldozer/Loader/Wheel Loader	3
Incenerator	4
IPLT	1
IPAL	8
UDPK	6

Sumber: Sub-Bagian Tata Usaha Dinas Kebersihan Kota Padang

Tabel 4
Perolehan Piala Adipura dan Adipura Kencana

Tahun	Piala
1986/1987	Adipura
1987/1988	Adipura
1988/1989	Adipura
1989/1990	Adipura
1990/1991	Adipura Kencana
1991/1992	Adipura
1992/1993	Adipura Kencana
1993/1994	Adipura Kencana
1994/1995	Adipura Kencana
1995/1996	Adipura Kencana
1996/1997	Adipura Kencana

Tabel 5
Keterpaduan Dinas/Instansi Dalam Pengelolaan K-3 Kotamadya Padang, 1999

Instansi/Dinas	Tugas
Dinas Pekerjaan Umum	Membersihkan Riol/Selokan
Dinas Pertamanan	Membersihkan Taman Kota
Dinas Ketertiban Umum	Melaksanakan Tindakan Hukum
Dinas Pasar	Membersihkan Lingkungan Pasar
Dinas DLLAJR	Mengelola Kebersihan Terminal
Dinas Pendapatan Daerah	Mengelola Retribusi Kebersihan
PDAM	Memungut Retribusi Kebersihan
Deppen	Melaksanakan Penyuluhan dan Penerangan
Polri/Kejaksanaan/Pengadilan	Melaksanakan Peradilan Cepat
Dinas Kebersihan Kota	■ Melaksanakan Pengumpulan, Pengangkutan & Pemusnahan Sampah ■ Melaksanakan Penyuluhan dan Pengawas-an terhadap rumah Makan dan Restoran dan lain-lain
Dinas Pariwisata	Mengelola K-3 di Objek Wisata
Tim K-3 Kodya Padang	Melaksanakan Perencanaan, Pengawasan, Pembinaan dan Evaluasi K-3

Tabel 6
Program Kerja Terpadu Pembenahan K-3 di Kotamadya Padang, Tahun 1999/2000
Bagian Tanggungjawab Dinas Kebersihan Kotamadya Padang

No.	Program Kerja	Kegiatan	Jadwal
1	Kelembagaan:		
a.	Penyegaran Tim Pengawas K-3 Tk II	Pembuatan SK Tim Pengawas K-3 Kodya Padang	Minggu III April 1999
b.	Penyegaran Tim Pengawas K-3 di Lingkungan DPK	Pembuatan SK Tim Pengawas K-3 di Lingkungan DPK	Minggu II April 1999
c.	Penambahan Petugas Kebersihan Kelurahan dari 215 menjadi 420	Persiapan Adm. Dan pendataan thdp Kelurahan yang diprioritaskan.	Minggu I Mei 1999.
			Minggu IV April 1999.
d.	Penyegaran Tim Pengawas K-3 Tk Kecamatan	Melakukan penyisipan dan penambahan anggota pengawas K-3 di setiap Kec.	Minggu I April 1999
e.	Rapat Evaluasi K-3 Kodya Padang	Melanjutkan dan meningkatkan rapat-rapat evalusi K-3 Tk. Kodya	Minggu II Mei 1999
f.	Penyegaran/Pembentukan Satgas K-3 kodya Padang	Mengaktifkan kembali Satgas K-3 Kodya Padang	Minggu I Mei 1999
g.	Peningkatan Kesejahteraan Petugas Lapangan	■ Mengembalikan Pemba-yaran upah Petugas Keb. Lapangan dari Premkel ke DPK.	
		■ Melanjutkan Asuransi bagi Petugas Lapangan	
2	Sarana dan Prasarana		
a.	Melengkapi sarana kebersihan untuk Petugas Kelurahan	■ Penyerahan 41 bh becak thdp Kelurahan yang sangat membutuhkan	Minggu II April 1999
			Juli 1999
b.	Renovasi LPS	■ Pengadaan Becak Baru	Minggu IV
		■ Perbaikan LPS	April 1999
		■ Pembuatan Plank LPS	Mg II Mei 99
c.	Pengadaan Truk Sampah	Pembauatan DIP/Tender	Mg II Mei 99
d.	Pengadaan Container	Pembelian Container Baru	1 Mei 99
e.	Pengadaan Karung Sampah	Membagikan Karung Sampah Kpd Petugas	April 1999
f.	Renovasi Becak Sampah	Bantuan biaya perbaikan Becak sampah Kelurahan	

3	Pengelolaan K-3 di Tingkat Kelurahan		
	a. Kebersihan	■ Memasukkan sampah ke dalam kantong	Setiap hari .
		■ Pengakatan sampah dari rumah ke LPS	Setiap hari .
		■ Pengakatan sampah dari LPS ke LPA	Setiap hari .
		■ Pembersihan riol/selokan	Mg II Mei 99
		■ Pembersihan jalan/gang	Mg II Mei 99
		■ Melaksanakan goro	Mg I Mei 99
		■ pengangkatan sampah goro	Mg I Mei 99
4	Penyuluhan K-3 Terpadu		
	a. Oleh Tim K-3	■ Kpd RT/RW/LKMD dan Lurah	Mg II Mei 99 .
		■ Kpd Petugas Kebersihan	Mg III & IV Mei 1999
	b. Oleh Pemuka Masyarakat / Mubalig	Penyuluhan Thdp Masyarakat .	
	c. Himbauan K-3 Melalui Media Massa	Melalui Media Elektronik dan Media Cetak	Minggu IV Apri 1999
	d. Monitoring Lapangan oleh Tim K-3 Kodya	Pengawasan oleh Tim K-3 setiap minggu	Mulai April 1999
	e. Pembuatan Spanduk / Himbauan K-3 di Tempat Umum	Pemasangan Spanduk dan Stiker K-3	Mei 1999
5	Pengelolaan K-3 di Tempat-Tempat Umum	.	.
	a. Pembenahan K-3 di Jalan-Jalan Umum	■ Pengumpulan / Pengang-katan Sampah	Setiap Hari .
		■ Pembersihan Riol	Mei 1999
		■ Pembenahan Trotoar	Mei 1999
		■ Pengecatan Canstin	Mg IV Jul 99

Lampiran 7
DAFTAR REKAPITULASI BIAYA RUTIN DPK DATI II KOTAMADYA PADANG
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

Pasal	Uraian Pasal	Jumlah Anggaran			Pembagian per triwulan			
		1998/1999	1999/2000	Peningkatan	I	II	III	IV
14	POS DINAS KEBERSIHAN KOTA	1,977,036.8	3,186,893.5	1,213,356.8	849,418.6	777,891.6	764,791.6	794,791.6
	I. Belanja Pegawai	425,173.0	807,609.0	382,436.0	201,902.3	201,902.3	201,902.3	201,902.3
1001	Gaji dan tunjangan lainnya	387,178.0	737,139.0	349,961.0	184,284.8	184,284.8	184,284.8	184,284.8
10	Gaji pokok	281,621.0	476,962.0	195,341.0	119,240.5	119,240.5	119,240.5	119,240.5
20	Tunjangan keluarga	34,663.0	34,663.0	0.0	8,665.8	8,665.8	8,665.8	8,665.8
30	Tunjangan jabatan	17,100.0	17,100.0	0.0	4,275.0	4,275.0	4,275.0	4,275.0
40	Tunjangan per penghasilan	47,498.0	202,118.0	154,620.0	50,529.5	50,529.5	50,529.5	50,529.5
90	Lain-lain tunjangan	6,296.0	6,296.0	0.0	1,574.0	1,574.0	1,574.0	1,574.0
1002	Tunjangan Beras	37,245.0	69,720.0	32,475.0	17,430.0	17,430.0	17,430.0	17,430.0
10	Harga beras	37,245.0	69,720.0	32,475.0	17,430.0	17,430.0	17,430.0	17,430.0
90	Lain-lain tunjangan beras	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1004	Uang Lembur	750.0	750.0	0.0	187.5	187.5	187.5	187.5
10	Uang lembur bisa	400.0	450.0	50.0	112.5	112.5	112.5	112.5
90	Lain-lain uang lembur	350.0	300.0	(50.0)	75.0	75.0	75.0	75.0
	II. Belanja Barang	24,680.0	57,597.0	32,917.0	39,184.5	6,137.5	6,137.5	6,137.5
1011	Ongkos Kantor	23,880.0	30,702.0	6,822.0	12,889.5	5,937.5	5,937.5	5,937.5
10	Alat-alat tulis	12,000.0	10,000.0	(2,000.0)	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
20	Berang cetakan dipakai habis	7,000.0	13,952.0	6,952.0	8,702.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0
50	Jasa perkantoran	500.0	750.0	250.0	187.5	187.5	187.5	187.5
60	Langganan listrik, telpon, air, dan gas	4,380.0	6,000.0	1,620.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0
1012	Pengadaan Inventaris Kantor	0.0	3,600.0	3,600.0	3,600.0	0.0	0.0	0.0
1014	Biaya Perpustakaan	300.0	300.0	0.0	75.0	75.0	75.0	75.0
1016	Biaya Pakaian Dinas	0.0	22,495.0	22,495.0	22,495.0	0.0	0.0	0.0
1029	Biaya Penguburan Jenazah Terlantar	500.0	500.0	0.0	125.0	125.0	125.0	125.0
	III. Belanja Pemeliharaan	694,000.0	708,500.0	18,000.0	182,375.0	175,375.0	175,375.0	175,375.0
1053	Biaya pemeliharaan kendaraan	689,000.0	703,000.0	14,000.0	181,000.0	174,000.0	174,000.0	174,000.0
10	Biaya pengujian kendaraan	5,999.3	7,000.0	1,000.8	7,000.0	0.0	0.0	0.0
20	Reparasi dan pengantian suku cadang	207,000.0	210,000.0	3,000.0	52,500.0	52,500.0	52,500.0	52,500.0
30	Biaya services	60,000.0	65,000.0	5,000.0	16,250.0	16,250.0	16,250.0	16,250.0
40	Biaya pembelian BBM	311,000.0	311,000.0	0.0	77,750.0	77,750.0	77,750.0	77,750.0
50	Pembelian Accu dan Ban	90,000.8	95,000.0	4,999.3	23,750.0	23,750.0	23,750.0	23,750.0
90	Lain-lain Biaya Pemeliharaan	15,000.0	15,000.0	0.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0
1054	Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	1,500.0	1,500.0	0.0	375.0	375.0	375.0	375.0
10	Perbaikan politur mobiler kantor	500.0	500.0	0.0	125.0	125.0	125.0	125.0
20	Rep. & serv. mesin kantor dan kompute	250.0	250.0	0.0	62.5	62.5	62.5	62.5
90	Lain-lain biaya pemeliharaan inv. kanto	750.0	750.0	0.0	187.5	187.5	187.5	187.5
1059	Biaya Pemeliharaan Kuburan	3,500.0	4,000.0	4,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
	IV. Belanja lain-Lain	833,183.8	1,613,187.5	780,003.8	425,956.9	394,476.9	381,376.9	411,376.9
1081	Uang Perangsang/Incentif	57,683.8	57,500.0	(183.8)	14,375.0	14,375.0	14,375.0	14,375.0
1085	Biaya Menghias Kota	9,000.0	50,000.0	41,000.0	36,900.0	13,100.0	0.0	0.0
1090	Biaya Kesejahteraan Pegawai	10,000.0	42,180.0	32,180.0	7,680.0	1,500.0	1,500.0	31,500.0
1091	Biaya Pembuatan Tanda Larangan	1,500.0	1,500.0	0.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0
1092	Sanitasi	755,000.0	1,462,007.5	707,007.5	365,501.9	365,501.9	365,501.9	365,501.9

Tabel 8
Laporan Realisasi Pelaksanaan K-3

I. Institusi dan Pembiayaan		
No	Kegiatan	Keterangan
1.	Jumlah personil kebersihan	1361
2.	Pembiayaan Rutin Pembangunan	 Rp. 4.231.129.000 Rp. 352.862.000
3.	Realisasi retribusi kebersihan Tahun 1996/1997 Tahun 1997/1998	 Rp. 1.102.950.000 Rp. 1.109.335.000
II. Teknis Operasional		
1.	Produksi sampah Sampah terangkut Frekuensi pengangkutan dari TPS: - gerobak - truk - kontainer Pengolahan/kondisi di TPA - sampah diterima - pemadatan sampah - penutupan tanah - kepadatan lalat - kebakaran	2.086,00 m3/hr 1.804,00 m3/hr - kl/hr 3,10 kl/hr 6,00 kl/hr 1.740m3/hr 1 x sehari 4 kl/bln 18 gr/blk tidak ada
	Pembuatan kompos Daur ulang Pengolahan di IPLT - kapasitas - limbah terolah	33,00 m3/hr 29,00 m3/hr 81,6 m3/hr 27,5 m3/hr
	Pengolahan IPAL - kapasitas - limbah terolah	 572 m3/hr 424 m3/hr
2.	Prasarana pengumpulan - jumlah gerobak - jumlah truk - ritasi gerobak/hari - ritasi truk/hari - jumlah TPS - TPS beroperasi	 993 buah 58 buah 1,44 kali 3,10 kali 238 buah 238 buah
3.	Pengolahan sampah/limbah - Buldozer/loader/wheel loader	 3 buah
4.	Jumlah incenator Jumlah incenator beroperasi	3 buah 2 buah
5.	Jumlah IPLT Jumlah IPLT beroperasi	1 buah 1 buah
6.	Jumlah IPAL Jumlah IPAL beroperasi	8 buah 8 buah

7.	Pembuatan kompos/daur ulang - UPDK yang beroperasi - Voluma	 6 buah 33 m3/hr
8	Jumlah sampah yang dibuang ke TPA	1804 m3/hr
III. Aspek Kesehatan		
1.	Pemantauan dan pengawasan penyakit menular: a) Demam berdarah: - PSN massal di perumahan - PSN massal di tempat umum - Angka bebas jentik b) KLB diare	 4 kali/tahun 4 kali/tahun 92,77 % 1 kali/tahun
2.	Penanganan sampah di rumah sakit: - pemisahan sampah medis - pemanfaatan incenator - ritasi pengangkutan - penanaman sampah medis	 Ya Ya 1 kali sehari Ya
3.	Pemantauan dan pengendalian kualitas kesehatan lingkungan: a) Pengendalian vektor TPS b) Pengendalian vektor di TPA c) Pemeriksaan kualitas air sungai BOD, COD, TSS,pH, E.coli	 2 kali/tahun 2 kali/tahun 3 kali/tahun
IV. Peran Serta Masyarakat/Sektor Bisnis		
1.	Program pengurangan sampah: - dimanfaatkan untuk daur ulang - dimanfaatkan untuk kompos	 1,66 % 1,87 %
2.	Bantuan pihak swasta terhadap pengelolaan sampah: - tong sampah - truck - taman - Uang	 2500 buah - 5 buah -
IV. Aspek PKK		
1.	Pengelolaan/penanganan sampah rumah tangga a) Pemisahan sampah disumbernya b) Dimanfaatkan untuk kompos skala r. t. c) Dimanfaatkan untuk daur ulang	 3,53% Ya Ya
2.	Memelihara kebersihan selokan lingkungan rumah tangga: - membersihkan selokan	 4 kali/bulan
V. Aspek Penghijauan/Keindahan Kota		
1.	Luas ruang terbuka hijau	180.000 m2
2.	Jumlah pohon	127.747 buah
3	Luas yang ditanami (%tase tutupan)	11,38%
4.	Jenis pohon	Kasia, mahoni, dadap angsana, tanjung, palam raya

Tabel 9 Laporan Pelayanan Sampah Dinas Kebersihan Kotamadya Padang 1999

No	Sumber Sampah	Produksi		Terangkat	
		m3/hari	%	m3/ hari	%
1	Pemukiman	1.150	61,93	900	78,26
2	Pasar	340	18,31	340	100,00
3	Komersil/Pertokoan	170	9,15	170	100,00
4	Perkantoran	55	2,96	38	69,09
5	Fasilitas	15	0,18	15	100,00
6	Sapuan Jalan	69	3,72	69	100,00
7	Kawasan Industri	34	1,83	34	100,00
8	Saluran	14	0,75	14	100,00
9	Lain-lain	10	0,54	10	100,00
	Jumlah	1.857	100,00	1.585	85,35

Gambar 4.1. Mekanisme Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kabupaten Dati II Gianyar

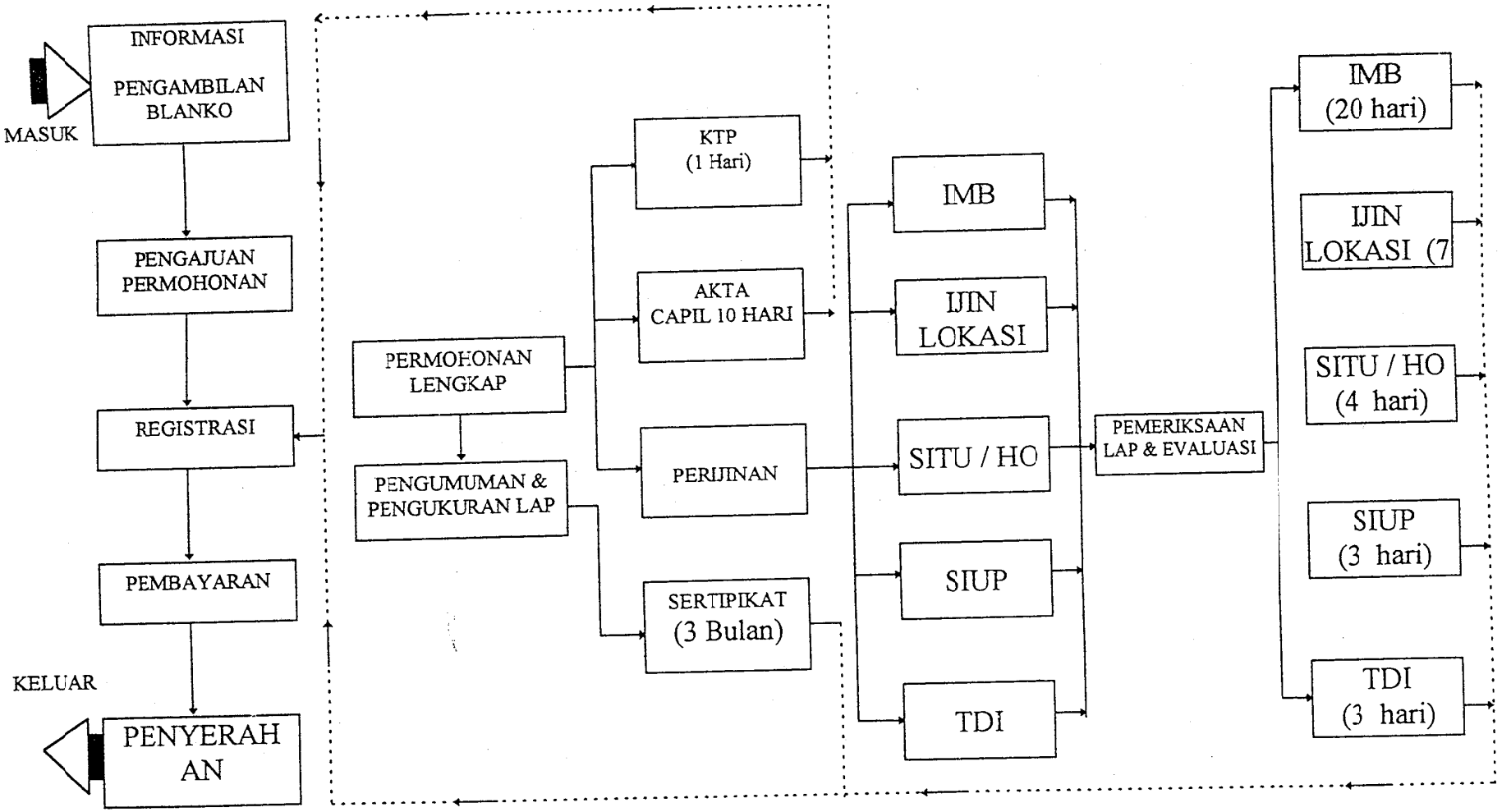
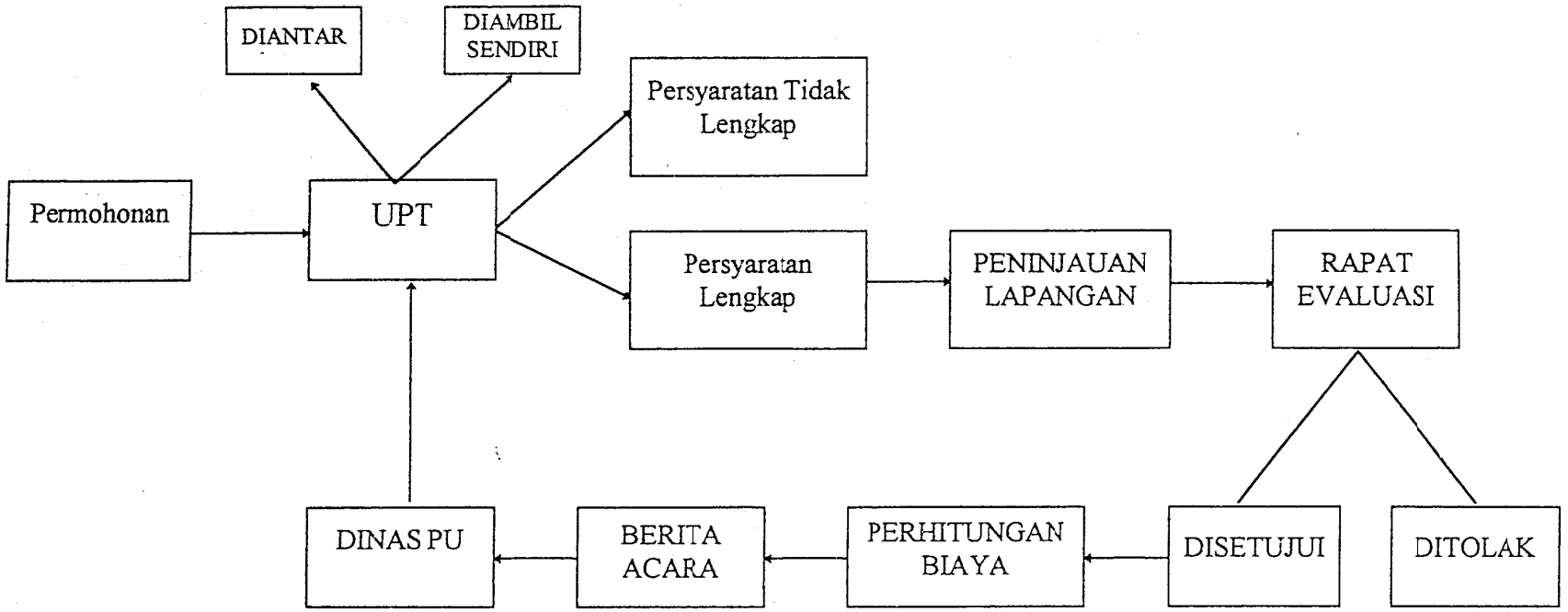
Gambar 4.2. Proses Pengurusan IMB